

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

LAKSAMANA ARU SULAIMAN

NIM. 0502172353

Program Studi:

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh:

LAKSAMANA ARU SULAIMAN

NIM. 0502172353

Program Studi:

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LAKSAMANA ARU SULAIMAN**
NIM : 0502172353
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jemadi Gg. Bunga No. 48 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



LAKSAMANA ARU SULAIMAN
NIM. 0502172353

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

Oleh:

Laksamana Aru Sulaiman

NIM. 0502172353

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 23 Oktober 2021

Pembimbing I



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA)” an. Laksamana Aru Sulaiman, NIM 0502172353 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 01 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 01 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Hl. Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN. 2001077903



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

Pembimbing I



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak
NIDN. 0126099001

Penguji I



Ahmad Amin Dalimunthe, Ph.D
NIDN. 2012078402

Penguji II



Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si
NIDN. 2016068403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Laksamana Aru Sulaiman, NIM 0502172353. “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)”. Di bawah bimbingan Bapak Imsar, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Kas merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Masalah pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas belum berjalan dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, mengetahui hasil evaluasi, dan mengetahui kendala-kendala evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode komparatif (perbandingan) antara teori unsur-unsur pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dengan pelaksanaan yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan unsur-unsur teori sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, yaitu ada fungsi-fungsi, prosedur-prosedur, dokumen-dokumen terkait yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, dan hanya menggunakan laporan arus kas. Juga terdapat kendala-kendala seperti tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas, dan badan pengawas yang belum menggunakan pihak independen. Implikasi penelitian ini terhadap KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah agar pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas bisa berjalan lebih baik dan maksimal, sehingga tujuan awal koperasi bisa tercapai.

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada Junjungan Alam Mahkota Alam Nabi Besar Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Alhamdulillah 'ala Kulli Hal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan menyusun skripsi yang berjudul **“EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA KPRI INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA)”**. Tahun ajaran 2020/2021..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini maka izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang teristimewa orang tua tercinta, Ayahanda Yosep Eka Permana dan Ibunda Rika Vera Sopha, S.H, M.M yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, cinta, motivasi, semangat, dukungan dan telah mengorbankan hidup mereka untuk penulis.

Di samping itu, izinkan juga penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang tak pernah lelah memberikan semangat, memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran – saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu.
8. Bapak Imsar, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I bagi penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan masukan bagi penulis mulai dari awal proses penyusunan skripsi sampai penyelesaian skripsi.
9. Bapak Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Pembimbing Skripsi II bagi penulis yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan bagi penulis mulai dari awal proses penyusunan skripsi sampai penyelesaian skripsi.
10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta membantu penulis selama kegiatan perkuliahan.

11. Teristimewa kepada Keluarga tercinta, Nenek Supiati, Tante Lailan Sovina S.E dan Tante Tri Astuti Handayani, S.H, beserta Adik tercinta Laksamana Azzam Ismail, dan tak lupa pula Mendiang Mbah Alm. Awaluddin dan Mendiang Adik Almh. Kanaya Raisya Khansa, yang sangat memiliki arti penting dalam hidup penulis.
12. Kekasih hati penulis, Deasy Cahayadie Deviana, yang selalu ada bagi penulis, dalam waktu susah maupun senang, termasuk dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Semoga kita tetap bisa bersama selamanya.
13. Dispenser Official, Abangda Fahmi Firdaus Siagian, Muhammad Gusti Pratama, Muhammad Alif Amansyah, Jevri Ansari, Adinda Aulia Fertianti, Ade Yan Celyna, Zulaiha Harahap. Kalian adalah keluarga kedua bagi penulis.
14. Keluarga besar AKS-A Stambuk 2017 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi rekan satu perjalanan selama perkuliahan.
15. Keluarga besar *Economic English Arabic Rabbani (E2AR)*, sebuah komunitas bahasa Arab dan Inggris yang memiliki arti persaudaraan yang erat bagi penulis. *English and Arabic are Our Crown*.
16. Keluarga besar Kelompok KKN 36 Pakpak Bharat. Terima kasih banyak untuk kenangan dan memori semasa KKN kita di Tanah Pakpak, *Njuah-juah Banta Karina*.
17. Bapak Ir. Suherman, M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
18. Bapak Aviscenna, S.E, M.Si selaku Ketua KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
19. Bapak Roger Sidabutar, S.E selaku Sekretaris KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
20. Ibu Septerina, S.E selaku Bendahara KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
21. Bapak Ishak Bancin selaku Manajer KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
22. Bapak Lionaptiraja Turnip, S.E selaku Ketua Badan Pengawas KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

23. Bapak Mhd. Nedy Afriadi, S.Sos selaku Sekretaris Badan Pengawas KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
24. Ibu Suryati Octavia Pasaribu, A.Md selaku Anggota Badan Pengawas KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
25. Keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang merupakan tempat penulis bekerja dan mendukung sepenuhnya agar penulis bisa bekerja sembari menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih banyak. KUSUMA PASTI HORAS, WBK/WBBM.
26. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih banyak.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan, penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca di masa yang akan datang.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan, Aamiin ya Robbal 'Alaamiin.

Medan, 18 Oktober 2021

Penulis



Laksamana Aru Sulaiman
NIM. 0502172353

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN..... i

PENGESAHAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Batasan Masalah.....7

C. Rumusan Masalah7

D. Tujuan Penelitian7

E. Manfaat Penelitian8

BAB II LANDASAN TEORI.....9

A. Kajian Teoritis.....9

1. Sistem Pengendalian Intern.....9

a. Pengertian Sistem.....9

b. Pengertian Pengendalian9

c. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....10

d. Tujuan Sistem Pengendalian Intern12

e. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern.....14

f. Pengendalian Intern Dalam Perspektif Islam18

2. Kas22

a. Pengertian Kas22

b. Jenis-jenis Kas.....	27
c. Sifat-sifat dan Ciri-ciri Kas	28
3. Pengeluaran Kas.....	29
a. Pengertian Pengeluaran Kas.....	29
b. Sumber Utama Pengeluaran Kas.....	30
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas.....	34
d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas	36
B. Kajian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Teoritis.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Profil KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	53
2. Struktur Organisasi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	55
3. Jaringan Usaha KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	58
4. Daftar Stok Barang KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Buku 2020	59
B. Temuan Penelitian.....	60
1. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM	

Provinsi Sumatera Utara	60
a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas	60
1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.....	60
2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan Biaya	61
3) Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi.....	62
4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya.....	63
b. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	63
1) Fungsi Pembelian	64
2) Fungsi Penjualan	64
3) Fungsi Kas.....	64
c. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	64
1) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar.....	64
2) Prosedur Pembayaran Kas.....	64
3) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas	64
d. Dokumen yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	64
1) Bukti Kas Keluar.....	64

2) Cek	64
3) Permintaan Cek	65
e. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	65
1) Laporan Arus Kas	65
2) Laporan Pemberian Pinjaman Tiap Bulan Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	65
3) Laporan Hasil Pengawasan Unit Simpan Pinjam Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	65
4) Laporan Hasil Pengawasan Unit Toko Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	66
C. Pembahasan Penelitian.....	66
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	66
a. Perbandingan Unsur-unsur Teori Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas dengan Pelaksanaannya pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	66
1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.....	66
2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan Biaya	67
3) Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi.....	68
4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan	

Tanggung Jawabnya.....	69
b. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	69
c. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	70
d. Dokumen yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	71
e. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	71
2. Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	72
a. Unsur-unsur Teori Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara....	72
1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas Belum Berjalan dengan Baik	72
2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan Biaya Belum berjalan dengan Baik	73
3) Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas	

dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Belum Berjalan dengan Baik	74
4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Sudah Berjalan dengan Baik.....	75
b. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	75
c. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	75
d. Dokumen yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	76
e. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas.....	76
3. Kendala yang terdapat dalam evaluasi sistem pengendalian Internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Kajian Terdahulu	36
2 Waktu Penelitian.....	49
3 Bentuk Daftar Stok Barang KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	59
4 Perbandingan Teori Tentang Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	67
5. Perbandingan Teori Tentang Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	68
6. Perbandingan Teori Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	68
7. Perbandingan Teori Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	69
8. Perbandingan Teori Tentang Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	70
9. Perbandingan Teori Tentang Prosedur yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan	

UKM Provinsi Sumatera Utara.....	70
10. Perbandingan Teori Tentang Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	71
11. Perbandingan Teori Tentang Catatan Akuntansi yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Kerangka Teoritis	46
2 Struktur Organisasi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap perusahaan biasanya melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan dan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang, maupun industri memiliki kas sebagai alat pembayaran yang biasanya siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan baik di dalam perusahaan jasa maupun industri pada umumnya adalah untuk memperoleh laba, karena dengan memperoleh laba, perusahaan diharapkan akan dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya.¹ Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, perusahaan tentunya memerlukan akuntansi.

Akuntansi pada umumnya merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis.² Sedangkan akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah didefinisikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.³

Akuntansi tidak hanya digunakan dalam praktek bisnis, tetapi juga digunakan di berbagai sektor kehidupan, termasuk kehidupan sehari-hari, semuanya tidak lepas dari peran akuntansi. Pencatatan, penjurnalan, serta perhitungan anggaran juga termasuk dalam sistem akuntansi. Tanpa disadari semua bidang membutuhkan akuntansi, termasuk organisasi nirlaba (non-profit) sudah

¹Amani Raudhatul Jannah, “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan*”, Skripsi Universitas Medan Area, (2018), h.1

²Hendra Harmain, dkk, *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 3*, (Medan: Madenatera, 2019), h.5

³Rahmat Daim Harahap, “*Akuntansi Syariah*”, Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2020), h.5

tentu membutuhkan pencatatan akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan terkini perusahaan yang bersangkutan. Di dalam akuntansi ada terdapat aktiva dan pasiva.

Berbicara tentang kas yang merupakan jenis aktiva lancar, maka setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan kas. Kas merupakan komponen aktiva yang paling penting, karena setiap transaksi baik yang dilakukan di dalam perusahaan maupun dengan pihak luar sebagian besar mempengaruhi kas. Kas merupakan aktiva yang paling likuid dibandingkan dengan komponen aktiva lainnya. Kas dapat digunakan sebagai alat pertukaran dalam operasional perusahaan. Kas merupakan objek yang sering diselewengkan, karena kas merupakan aktiva yang paling bernilai dari aktiva lainnya dan dapat dipindahtangankan dengan cepat serta diperlukan setiap orang. Biasanya kas dengan mudah diselewengkan pada saat terjadinya proses transaksi. Elemen-elemen kas dapat berupa uang tunai (uang kertas dan logam), cek, pos wesel, dan simpanan di bank serta hal-hal lain yang dapat disamakan dengan uang dalam suatu perusahaan misalnya surat-surat berharga seperti saham dan obligasi.⁴

Kas mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh aktiva lainnya, yaitu kas tidak mudah diidentifikasi pemiliknya, bentuknya relatif kecil, mudah dipindahtangankan melalui transfer dalam kurun waktu yang relatif singkat, mudah dibawa-bawa dan keinginan untuk memilikinya tinggi. Sehingga selalu menjadi sasaran penyelewengan. Hal ini terjadi karena hampir seluruh transaksi dalam perusahaan berhubungan dengan kas, baik pada perusahaan jasa, industri (umumnya bergerak di bidang produksi yang merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia)⁵, maupun perusahaan dagang. Oleh karena itu untuk menghindari penyelewengan maka sudah seharusnya perusahaan melakukan pengendalian intern yang memadai terhadap kas pada suatu perusahaan.

Sifat kas yang likuid (lancar), menyebabkannya mudah berpindah tangan dan relatif mudah diselewengkan atau digelapkan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka perusahaan harus memiliki suatu badan yang dapat

⁴Suroso “*Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galuh Pratama*”, Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu (Vol.2 No.1 Maret 2016), h.138

⁵Imsar, “*Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*”, Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2018), h.14

mengawasi serta mengatur kas agar kegiatan operasional terarah dan tidak terjadi penyalahgunaan dalam kas. Untuk itu perusahaan memerlukan sistem pengendalian intern kas.⁶

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu diantara dua sistem yaitu *fluctuating fund balance system dan imprest system*. Dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar, cek, permintaan cek (*Check Request*). Catatan akuntansi yang digunakan adalah Jurnal Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement Journal*), Register cek (*Check Register*). Fungsi yang terkait adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksa intern.

Pengendalian merupakan alat yang dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi perusahaan dalam mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya, melindungi kekayaan atau aktiva perusahaan dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan. Sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern merupakan suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan laporan (administrasi), *budget* dan standar pemeriksaan intern dan sebagainya.⁷

Pengendalian intern yang baik terhadap kas memerlukan prosedur- prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam

⁶Yenni Samri Juliati Nst dan Amani Raudhatul Jannah, “Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, (Vol.2 No.1 Desember 2019), h.516

⁷Vicky Fiara Rizky Saragih, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2018), h.2

merancang prosedur-prosedur tersebut hendaknya diperhatikan tiga prinsip pokok pengendalian intern. Pertama, harus terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang bertanggungjawab menangani transaksi kas dan menyimpan kas tidak merangkap sebagai petugas pencatat transaksi kas. Kedua, semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya ke bank secara harian. Ketiga, semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang kecil jumlahnya dimungkinkan untuk menggunakan uang tunai, yaitu melalui kas kecil.⁸ Unsur pengendalian intern adalah fungsi penyimpanan kas kecil harus terpisah dari fungsi akuntansi dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain.⁹

Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai dengan UUD No.25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan koperasi juga bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.¹⁰

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), merupakan jenis koperasi yang berdasarkan status anggotanya adalah para pegawai negeri. KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah pelaksana dari Kementerian Koperasi yang mempunyai tugas dalam bidang pengkoperasian usaha kecil dan menengah serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.. KPRI INSKO ialah Koperasi yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang jasa.

⁸<http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-struktur-pengendalian-intern>, diakses Minggu tgl 25 Juli 2021 pukul 17:00 WIB.

⁹Muhammad Saifi dan Nila Firdausi Nuzula “*Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas*” Jurnal Akuntansi Bisnis (Vol.2 No.2 Februari 2015), h.2

¹⁰Gusti Ayu Anom Pradnyawati, Wayan Suhendra, Nyoman Sudjana “*Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Pegawai Negeri Setya Graha di Kecamatan Mendoyo Tahun 2017*” Jurnal Pendidikan Ekonomi (Vol. 11, Nomor 01, 2019, 250-259), h. 250

Untuk semua transaksi pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, semuanya masih dicatat secara manual. Untuk laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara juga masih melakukan pencatatan dengan sistem manual, belum menggunakan aplikasi. Dan untuk aktivitas pengendalian intern yakni pengawasan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Badan Pengawas, yang terdiri dari 1 (satu) ketua 1 (satu) sekretaris, dan 1 (satu) anggota. Aktivitas pengawasan tersebut masih dilakukan secara bersama-sama, karena sejauh ini belum dilakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab.¹¹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, ternyata KPRI INSKO belum menerapkan sistem komputerisasi dalam pengolahan data akuntansi. Tugas unit ini membutuhkan suatu perencanaan kas yang efektif dan efisien. Dengan berperannya kas dalam kegiatan koperasi, maka koperasi harus memastikan bahwa apakah sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas sudah berjalan dengan baik atau belum.

Belum adanya pemisahan tugas seperti fungsi kredit dan kasir dimana kedua fungsi ini hanya dilakukan oleh seorang bendahara saja. Dalam hal ini kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan wewenang profesi dan juga bisa terjadi penyelewengan uang kas dalam transaksi yang menyebabkan timbulnya kerugian yang disebabkan penggunaan uang kas yang tidak perlu dikeluarkan harus dikeluarkan sehingga membuat penggunaan uang tersebut tidak berjalan dengan efektif. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu pengawasan administrasi yang baik untuk menghindari resiko tersebut. Pengawasan tersebut dapat berupa penataan intern koperasi yang meliputi pemberlakuan sistem informasi akuntansi yang baik, menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan, penipuan, penggelapan, pemborosan terhadap harta kekayaan koperasi atau praktek-praktek lain yang dapat merugikan koperasi.

¹¹Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 17 Juni 2021.

Juga pada sektor Badan Pengawas, masih dipilih melalui sesama anggota KPRI INSKO berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang melaksanakan pengendalian intern secara bersama-sama. Karena fungsi dari sektor Badan Pengawas masih dijalankan oleh sesama anggota KPRI INSKO tanpa melibatkan pihak independen, maka pengendalian intern pada KPRI INSKO masih belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dilakukan oleh Serli Septriani (2018) yang berjudul Evaluasi Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu menyatakan bahwa, evaluasi penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik karena belum semua penerapan berjalan dengan baik. Ada beberapa struktur kerja pada CV tersebut belum berjalan sesuai teori, namun ada yang sudah terlihat bagaimana karyawan perusahaan mau bertanggung jawab atas semua kas keluar masuk di perusahaan. CV. Pemuda Jaya Karsa mengadakan pengauditan kas kepada pegawai yang bertanggung jawab sehingga tidak ada penyelewengan keuangan pada kas. Namun pada sistem pengauditan laporan keuangan ini belum berjalan dengan baik karena dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali seharusnya dilakukan setiap bulan pada akhir bulan untuk benar-benar mengurangi resiko kecurangan penyelewengan kas. Dengan cara pengauditan yang rutin sehingga membuat efektivitas kerja karyawan yang ada di perusahaan berjalan dengan efektif. CV. Pemuda Jaya Karsa juga belum menggunakan formulir nomor urut tercetak, sistem akuntansi pengeluaran kas suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Auditor dapat mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan staf akuntansi. Tidak adanya perputaran jabatan dalam struktur organisasi pada CV. Pemuda Jaya Karsa karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan pendapatan perusahaan yang belum berjalan dengan baik terlihat pada perusahaan tersebut untuk pengeluaran kas kecil belum mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi transaksi kas kecil.

Dengan berdasarkan beberapa informasi dan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO dan bagaimana hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO. Maka dari itu peneliti berinisiatif melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti berfokus pada evaluasi sisten pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari KPRI INSKO (Tahun Buku 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa kendala yang terdapat dalam evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui tentang hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui tentang kendala yang terdapat dalam evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan, dalam hal ini untuk mengetahui tentang bagaimana praktik sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas secara nyata di dunia kerja, yang sebelumnya telah dipelajari di bangku perkuliahan, serta menambah kemampuan penulis untuk lebih baik lagi dalam penulisan karya ilmiah.

- b. Bagi Entitas

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi entitas dalam hal sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, agar bisa lebih baik untuk entitas terkait di masa yang akan mendatang.

- c. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya apabila ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Ilmu Akuntansi, khususnya evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem

Istilah sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana menurut Marom, bahwa sistem adalah “suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.”¹

Menurut Cole/Neuschel dalam bukunya *Accounting System*, seperti yang dikutip oleh Baridwan bahwa defenisi sistem adalah “suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.”²

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

b. Pengertian Pengendalian

Sedangkan pengertian pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.³ Pengendalian juga diartikan sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁴

¹Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: Grafindo, 2002), h.1.

²Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2002), h. 1.

³T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 359.

⁴Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009), h. 242.

Pengendalian juga bisa artikan sebagai kegiatan memantau, menilai dan melaporkan kemajuan proyek disertai tindak lanjut.⁵ Jadi pengendalian ini adalah mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma-norma yang ditetapkan.

Bagi perusahaan, istilah internal kontrol atau pengendalian intern merupakan suatu istilah yang umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai kepentingan. Internal kontrol ini merupakan suatu sistem yang dapat membantu pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mempunyai peranan yang cukup penting bagi perusahaan sehingga pemimpin dapat menilai struktur organisasi yang ada pada kegiatan yang dilaksanakannya.

Dalam artian pengendalian intern menjelaskan berbagai prosedur yang ditetapkan pemilik atau pimpinan perusahaan untuk mengarahkan dan mengawasi bawahannya, sehingga hasil kerja yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan. Pengendalian intern juga berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

c. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.⁶

Sistem pengendalian intern adalah Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua

⁵Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 470.

⁶Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (ed.4), (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 129.

ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.⁷

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.⁸

Pengendalian internal (*internal control*) adalah prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.⁹

Pengendalian internal adalah rencana organisasi serta beberapa metode dan prosedur yang diadopsi perusahaan dalam rangka melindungi asetnya dan meninggalkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.¹⁰

Pengertian pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.¹¹

Jadi berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan

⁷Hery, *Siklus Akuntansi Perusahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 195.

⁸Anastasia dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Proses dan Penerapan*, (Jakarta: Andi, 2015), h. 82.

⁹James M. Reeve, et. al, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2012), h. 387.

¹⁰Jerry J. Weygandt, et. al, *Accounting Principles*, (ed. 7), Terj. Ali Akbar Yulinto, Wasilah, dan Rangga Handika, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 454.

¹¹Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (ed. 3), (AMP, YKPN, 2010), h. 218.

prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

d. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern yang diciptakan dalam perusahaan harus mempunyai tujuan, yakni agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan, sehingga mampu meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Beberapa tujuan dari sistem pengendalian intern adalah:

1) Menjaga aset organisasi

Struktur pengendalian intern yang baik akan mampu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, pencurian dan kecurangan-kecurangan yang dapat timbul terhadap aktivitas perusahaan.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen mempunyai kepentingan terhadap informasi keuangan yang diteliti dan yang diandalkan. Informasi akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, karena data akuntansi menerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan.

3) Mendorong efisiensi

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Struktur pengendalian

interdirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan serta prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.¹²

Dalam buku Siklus Akuntansi Perusahaan disebutkan bahwa tujuan dari sistem pengendalian adalah:

- 1) Aktiva yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar seluruh aktiva perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- 2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
- 3) Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan. Salah satu hal yang paling riskan dalam pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (*employee fraud*). Kecurangan karyawan ini adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh bentuk kecurangan karyawan yang sering dilakukan dan hampir selalu dijumpai pada sebagian besar perusahaan adalah melaporkan biaya perjalanan dinas dan penggantian pengobatan melebihi dari jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan.¹³

Tujuan pengendalian intern yaitu:

- 1) Keandalan dan integritas informasi. Komponen pengendalian “informasi dan komunikasi” secara utuh menjelaskan dan mencakup tujuan tersebut.

¹²Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (ed.4), (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 129-130.

¹³Hery, *Siklus Akuntansi Perusahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 196.

- 2) Ketaatan dengan kebijakan rencana dan prosedur organisasi. Komponen pengendalian “aktivitas pengendalian” menunjukkan bahwa penetapan dan ketaatan yang diperkuat terhadap kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan organisasi dalam jalur terhadap pencapaian tujuan.
- 3) Mengamankan harta, pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisiensi dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Ketiga tujuan tersebut secara langsung dinyatakan dalam halaman pertama *Executive Summary COSO*: “kategori pertama (efektivitas dan efisiensi operasi) menyatakan tujuan utama dari entitas, termasuk kinerja dan tujuan kemampuan labaan dan pengamanan sumber daya”.
- 4) Kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kontrak.¹⁴

e. **Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal**

Untuk menciptakan sistem pengendalian yang baik di dalam perusahaan, maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.

¹⁴Amin Widjaja Tunggal, *Pengendalian Internal Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*, (Jakarta: Harvarindo, 2013), h. 34.

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

- b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.

Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan beban suatu organisasi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.
- b) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi yang dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain, akan mengakibatkan terjadinya *internal check* terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, sehingga mendorong setiap unit organisasi melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya.
- d) Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- e) Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan

sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.

- f) Secara periodik diadakan percocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan percocokan atau rekonsiliasi antara aset secara fisik dengan catatan akuntansi atas aset tersebut.
 - g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat, semuanya tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:
- a) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
 - b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.¹⁵

¹⁵Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (ed.4), (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 130-135.

f. Pengendalian Internal Dalam Perspektif Islam

Pengawasan (pengendalian) dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.¹⁶

Maka dari itu, pengendalian internal dalam islam terbagi atas dua hal yaitu:

1) Pengendalian internal dalam diri sendiri (self control)

Pengendalian (kontrol yang berasal dari diri sendiri), yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah. Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al- Mujadilah ayat 7 berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ مَّجْزَىٰ

ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

¹⁶Mulyadi, *Auditing*, (ed. 6), (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 181.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 67.

Adapun tafsir dari Kementerian Agama RI tentang Q.S. Al-Mujadilah ayat 7 di atas adalah sebagai berikut:

Selain menyaksikan segala sesuatu, Allah juga mengetahui semua pembicaraan rahasia. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, karena penglihatan Allah menembus batas-batas ruang dan waktu? Oleh sebab itu, bagi Allah, tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya, karena Allah ada, hadir dan terlibat dalam keseharian hamba-hamba-Nya. Dan tidak ada lima orang yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan Dialah yang keenamnya, karena Allah dekat dan terlibat dalam aktivitas manusia. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan Dia, pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada, meskipun manusia sering tidak merasakan kehadiran Allah bersama mereka, karena kalbunya yang terhibab. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan dengan menghadirkan catatan yang merekam seluruh jejak hidupnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk pembicaraan rahasia di antara mereka.¹⁸

Pengendalian dalam diri juga berdasarkan pada Hadis Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya jujur itu dapat memberi petunjuk kepada kebaktian dan sesungguhnya kebaktian itu dapat memberi petunjuk ke surga. Sesungguhnya seorang benar-benar berbuat jujur hingga jadi dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu dapat memberi petunjuk kepada kedurhakaan, dan sesungguhnya kedurhakaan itu dapat memberi petunjuk ke neraka, Sesungguhnya seseorang benar-benar berbuat

¹⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/58/7>, diakses Minggu tgl 12 September 2021 pukul 12:00 WIB.

dusta hingga jadi dicatat di sisi Allah sebagai orang yang dusta.”
(HR. Bukhari, Muslim)¹⁹

2) Pengendalian internal yang berasal dari luar.

Pengendalian internal yang dari luar berarti ada hubungan dari pihak luar yaitu seperti sebuah lembaga, atau institusi dengan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen yang ada. Dari penjelasan yang dapat diringkas bahwa dalam islam dasar hal yang paling penting dalam pengendalian internal berasal dari diri sendiri, agar seorang muslim bisa menahan hawa nafsu nya untuk tidak berbuat kemaksiatan dalam segala hal pekerjaan yang dilakukannya baik untuk kepentingan individu, orang lain dan lembaga atau insitusinya, agar segala proses pekerjaan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien dengan tujuan yang lurus.

Pengendalian dalam Islam memiliki landasan diantaranya:²⁰

- 1) Tawa shaubil haqqi, saling menasehati atas dasar kebenaran dan normayang jelas.
- 2) Tawa shaubil shabri, saling menasehati atas dasar kesabaran, dengankata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.” (Q.S. Al-Ashr : 3).²¹

Adapun tafsir dari Kementerian Agama RI tentang Q.S. Al- Mujadilah ayat 7 di atas adalah sebagai berikut:

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada-Nya,

¹⁹Salim Bahreisy ,Tarjamah Riadhus Shalihin, PT Alma'arif, Bandung,1989, hlm.78, Bab Siddiq

²⁰Didin Hafiduddin dan Hendra Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.156- 160.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 98.

melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal saleh, mereka harus saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya, karena dorongan hawa nafsunya.²²

- 3) Tawa shaubil marhamah, saling menasehati atas dasar kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan secara personal dengan tujuan untuk pencegahan.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” (Q.S. Al-Balad : 17).²³

Adapun tafsir dari Kementerian Agama RI tentang Q.S. Al-Mujadilah ayat 7 di atas adalah sebagai berikut:

Pekerjaan berat lainnya adalah beriman dan saling menasihati untuk sabar dan menyayangi antara sesama Muslim. Sabar adalah kemampuan menahan diri, tabah menghadapi kesulitan, dan usaha keras mengatasi kesulitan tersebut. Kaum Muslimin harus mampu membuktikan imannya dengan melaksanakan sikap sabar itu, dan mendorong kaum Muslimin lainnya untuk melaksanakannya. Juga yang berat melaksanakannya adalah menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri atau keluarga sendiri. Akan tetapi, umat Islam harus mampu membuktikan imannya dengan

²²<https://quran.kemenag.go.id/sura/103/3>, diakses Minggu tgl 12 September 2021 pukul 12:00 WIB.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.113.

melaksanakan sikap saling menyayangi itu, sebagaimana juga diperintahkan Rasulullah: Orang yang penyayang disayang oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. (Riwayat at-Tirmidhi, Abu Dawud, dan Ahmad dari Abdullah bin 'Amr).²⁴

2. Kas

a. Pengertian Kas

Kas (*Cash*) adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas/logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar/alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari asset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank.²⁵

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengungkapkan pengertian kas adalah “Kas terdiri atas saldo kas (*Cash On Hand*), rekening giro, atau setara kas (*Cash Equivalent*) adalah sebuah investasi yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek dan bisa dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perubahan nilai yang signifikan”.²⁶ Ini menandakan bahwa perusahaan memiliki resiko yang relatif lebih kecil untuk tidak bisa memenuhi kewajiban (hutang) finansialnya. Namun hal ini tidak berarti sebuah perusahaan harus terus berusaha mempertahankan persediaan kas dengan jumlah yang sangat besar, karena makin besar rekening kas itu artinya makin besar dana menganggur (tidak digunakan) dan nantinya akan memperkecil laba perusahaan yang akan didapat.²⁷

Kas tidak hanya disimbolkan pada uang tunai saja, contohnya pada KPRI INSKO sumber-sumber penerimaan kas muncul dari transaksi-transaksi seperti penerimaan dari pengumpulan piutang, tabungan,

²⁴<https://quran.kemenag.go.id/sura/90/17>, diakses Minggu tgl 12 September 2021 pukul 12:00 WIB.

²⁵Warren,dkk.,*Pengantar Akuntansi Edisi 21*,(Jakarta : Salemba Empat,2007),h.54

²⁶Ikatan Akuntansi Indonesia,*Standard Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002)

²⁷*Ibid.*,h.322

simpanan berjangka, simpanan-simpanan lain, bunga, penjualan aktiva tetap, dan penghasilan lain-lain.

Sedangkan pengeluaran kasnya bisa muncul dari berbagai pembayaran tunai, misalnya untuk penyaluran pinjaman, pembayaran kembali tabungan, upah tenaga kerja, biaya-biaya tunai, pembelian aktiva tetap untuk periode yang bersangkutan, pajak dan pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha). Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kas adalah modal kerja yang sifatnya paling likuid/lancar. Semakin besar jumlah nominal kas yang terdapat pada suatu perusahaan artinya makin tinggi tingkat likuiditasnya.

Pencatatan dalam praktik akuntansi dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٨٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁸

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.35.

Adapun tafsir dari Kementerian Agama RI tentang Q.S. Al-Baqarah ayat 282 di atas adalah sebagai berikut:

Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang.

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran dan waktunya.

Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang-piutang.

Dan dianjurkan kepadamu ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan, begitu juga sebaliknya para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagunganNya dalam setiap perintah dan larangan, Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban,

Sedangkan dasar hukum dari hadist tentang pencatatan, sebagai berikut:

فَالأَوَّلُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مُتَقَفًّا عَلَيْهِ

Artinya:

“Pertama: Dari Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sabdanya: “*Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.*”²⁹

b. Jenis-jenis Kas

1) Kas Kecil (*Petty Cash*)

Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.48.

relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu:

a) Metode Dana Tetap (Metode *Imprest*)

Metode pengisian dan pengendalian kas kecil dimana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu karena pengisian kembali kas kecil akan sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Penetapan jumlah cadangan kas kecil ini biasanya bersifat final dan hanya diubah ketika perusahaan merasa bahwa kas yang sudah dicadangkan kurang sehingga perlu ditambah kembali jumlah cadangannya.

b) Metode Fluktuasi

Metode pencatatan dan pengendalian kas kecil, dimana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan dan penambahan kas kecil. Pada sistem ini, pengelola kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana kecil yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar.

2) Kas di Bank

Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Kas di bank ini selalu berhubungan dengan rekening Koran dari bank untuk perusahaan.

3) Pelaporan *Cash*

Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) *Cash Equivalents*

Cash Equivalents atau biasa disebut setara kas adalah kelompok asset perusahaan yang memiliki *maturity* kurang dari tiga bulan. Setara kas ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah, tidak stabil. Adapun contoh dari setara kas ini adalah surat utang negara (SUN) dan *treasury bill*.

b) *Restricted Cash*

Restricted cash merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan.

c) *Bank Overdrafts*

Bank overdrafts adalah perusahaan mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank.³⁰

c. Sifat-sifat dan Ciri-ciri Kas

Sifat-sifat dan ciri-ciri kas adalah sebagai berikut:

- 1) Alat tukar yang standar.
- 2) Dipakai sebagai dasar untuk mengukur dan menghitung.
- 3) Merupakan harta yang paling likuid dan biasanya diklarifikasikan sebagai harta lancar.
- 4) Untuk dapat digolongkan sebagai kas haruslah siap (tersedia) untuk pembayaran kewajiban-kewajiban lancar dan bebas dari batasan-batasan penggunaannya.

Item yang diklarifikasikan sebagai kas meliputi mata uang logam dan kertas yang ada di perusahaan serta dana dalam deposito bank yang tidak dibatasi penggunaannya yang sering kali disebut rekening Koran bank (*Demand Deposit*) karena hal itu dapat ditarik atas permintaan. Dana kas kecil atau dana tukar dan instrument yang dapat dinegoisasikan seperti cek pribadi, cek perjalanan, cek kasir, wesel bank, pos wesel (*money order*) atau item yang umumnya dilaporkan sebagai kas yang sering disebut sebagai ekuivalen kas.³¹

³⁰Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004),h.105

³¹*Ibid.*,h.201

3. Pengeluaran Kas

a. Pengertian Pengeluaran Kas

Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal berikut: pengeluaran dalam jumlah besar dilakukan melalui bank.³²

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan.

Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil, semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu dan terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran.³³

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan aktifitas pada siklus pengeluaran dan pembelian (bukan penggajian), diawali dengan melakukan pesanan, kemudian barang datang dan diterima dan disimpan, melakukan pembayaran faktur pembelian. Pada awalnya, dari pemasok secara elektronik menyampaikan informasi mengenai pengiriman barang yang akan sampai petugas bagian penerimaan dengan sistem proses permintaan melakukan verifikasi terhadap barang yang dikirim tersebut, ketepatan waktu kiriman juga menjadi bahan pertimbangan.³⁴

b. Sumber Utama Pengeluaran Kas

1) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Cek

Pengeluaran kas dengan cek memiliki dengan kebaikan ditinjau dari pengendalian intern sebagai berikut:

- a) Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan ditulis pada formulir cek. Dengan demikian pengeluaran kas dengan

³²Soemarso, *Sistem Akuntansi Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),h.297

³³Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi IV*, (Jakarta: Salemba Empat,2016),h.78

³⁴Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),h.91

cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar.

- b) Dilibatkannya pihak luar (pihak bank) dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas pada perusahaan. dengan digunakannya kas pada setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkan oleh bank, secara periodik mengirim Koran bank (*bank statement*) kepada perusahaan nasabahnya. Rekening Koran inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas.
- c) Jika sistem perbankan mengembalikan *concelled check* kepada *chech issuer*, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakan *concelled check* sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran, *check issuer* akan secara otomatis menerima tanda penerimaan dari pihak yang menerima pembayaran.

Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dengan cek sebagai berikut:

- a) Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembelian jas dan untuk biaya perjalanan dinas), fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi hutang. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan.

- b) Fungsi Kas

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirim cek kepada kreditur via pos atau pembayaran langsung kepada kreditur.

- c) Fungsi Akuntansi

Bagian akuntansi yang terkait dalam pengeluaran ini adalah bagian kartu persediaan dan kartu biaya serta bagian buku jurnal, buku besar dan pelaporan. Tugasnya yaitu menerima dari bagian utang lembar pertama bukti pengeluaran kas beserta bukti-bukti pendukung. Selain itu menyimpan bukti-bukti pengeluaran uang serta bukti-bukti pendukung ke dalam suatu file yang disebut dengan file bukti pengeluaran uang yang telah dibayar. Dalam menyimpan bukti-bukti pengeluaran uang ini, sebelumnya diurutkan menurut urutan nomor bukti pengeluaran uang.

d) Bagian Pemeriksa Item

Bagian ini berfungsi memverifikasi pengeluaran-pengeluaran uang ini, termasuk mengecek penanggungjawab dari pejabat-pejabat yang berwenang atas dan selama proses pengeluaran kas tersebut.

Dokumen dan catatan yang digunakan sistem pengeluaran kas dengan cek, sebagai berikut :

a) Dokumen Pelengkap Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mendukung permintaan pengeluaran kas.

b) Cek

Dari sudut sistem informasi cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek.

c) Voucher

Dokumen ini sebagai permintaan dari yang memerlukan pengeluaran kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas keluar.

Catatan akuntansi dalam sistem pengeluaran kas dengan cek, sebagai berikut :

a) Jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat pengeluaran kas.

- b) Register cek, digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan untuk membayarkan kreditur atau pihak lain.

Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut :

- a) Prosedur Permintaan Cek

Dalam prosedur ini fungsi yang memerlukan pengeluaran mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan pengeluaran cek.

- b) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar

Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya ditulis dalam dokumen tersebut.

- c) Prosedur Pembayaran Kas

Dalam prosedur ini fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan mengirim cek kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar.

- d) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau *register check*.

2) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Dana Kas Kecil

Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil, yaitu:

- a) Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembelian jas dan perjalanan dinas), fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian utang). Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan.

- b) Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggungjawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil pada saat pengisian kembali dana kas kecil.

c) Fungsi Akuntansi

Dalam sistem dana kas kecil fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pencatatan pengeluaran kas dana kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil (dalam *fluctuating-fund-balance system*), pembuatan bukti kas kecil yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek.

d) Fungsi Pemeriksa Intern

Fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan akuntansi.

Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, yaitu:

a) Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil.

b) Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggung jawabkan pemakai dana kas kecil. Dokumen ini dilampirkan oleh bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil.

c) Permintaan Pengisian Kembali Dana Kas Kecil

Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, sebagai berikut :

a) Jurnal Pengeluaran Kas

Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil.

b) Register Cek

Dalam sistem dana kas kecil catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil.

c) Jurnal Pengeluaran Dana Kas Kecil

Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Suatu sistem terdiri dari sub-sub atau unsur pembentuk sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saja dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu juga suatu pengendalian intern yang memadai harus terdiri dari unsur-unsur yang membentuk pengendalian intern tersebut. Sistem pengendalian intern pengeluaran kas, yaitu:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

- 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah:
 - a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya harus dipertanggung jawabkan.
 - b) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa.
 - c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa adanya campur tangan oleh orang atau organisasi lain.
 - d) Perputaran jabatan untuk menghindari terjadinya persengkokolan.
 - e) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - f) Pembentuknya unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern lain, unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawab, bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.³⁵

³⁵Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi Edisi 5 Cetakan ke 3*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE,2001),h.164

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas tersusun melalui prosedur-prosedur kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga jaringan prosedur perlu disusun untuk mempermudah dalam mengontrolnya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek.
- 2) Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek.³⁶

B. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Serli Septriani (2018), Evaluasi Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu ³⁷	Pengendalian Intern dan Pengeluaran Kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik karena belum semua penerapan yang berjalan dengan baik. 2. Ada beberapa struktur kerja pada CV tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Serli adalah CV (badan usaha), sementara penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Koperasi. 2. Jika CV tujuan utamanya

³⁶Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.514

³⁷Serli Septriani, "Evaluasi Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018), h.61-62

			<p>belum berjalan sesuai teori diatas, namun ada yang sudah terlihat bagaimana karyawan perusahaan mempertanggung jawab semua kas yang keluar masuk di perusahaan.</p> <p>3. CV. Pemuda Jaya Karsa mereka mengadakan pengauditan kas kepada pegawai yang bertanggung jawab sehingga tidak ada penyelewengan keuangan pada kas. Namun pada sistem pengauditan laporan keuangan ini belum berjalan dengan baik karena dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali seharusnya dilakukan setiap bulan pada akhir bulan untuk benar-benar mengurangi resiko kecurangan penyelewengan kas. Dengan cara pengauditan yang rutin sehingga membuat efektivitas kerja karyawan yang ada di perusahaan berjalan dengan efektif.</p>	<p>adalah untuk mencari keuntungan, sementara tujuan utama koperasi adalah untuk menyajahterakan para anggotanya.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan pengendalian intern terhadap pengeluaran kas, CV Pemuda Jaya Karsa sudah melaksanakan audit selama 6 bulan sekali, sementara KPRI INSKO tidak ada melaksanakan audit. KPRI INSKO hanya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).</p> <p>4. Jika pada CV Pemuda Jaya Karsa belum melakukan perputaran jabatan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, maka pada KPRI INSKO sudah dilakukan perputaran jabatan sehingga setiap anggota pernah</p>
--	--	--	--	--

			<p>4. CV. Pemuda Jaya Karsa juga belum menggunakan formulir nomor urut tercetak, Sistem akuntansi pengeluaran kas suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Auditor dapat mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan staf akuntansi.</p> <p>5. Tidak adanya perputaran jabatan dalam struktur organisasi pada CV. Pemuda Jaya karsa karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan pendapatan perusahaan yang belum berjalan dengan baik terlihat pada perusahaan tersebut untuk pengeluaran kas kecil belum mendapatkan otorisasi terlebih</p>	<p>merasakan menduduki posisi atau jabatan yang tersedia.</p> <p>5. Antara CV Pemuda Jaya Karsa dan KPRI INSKO memiliki sistem pencatatan pengeluaran kas yang berbeda.</p>
--	--	--	---	---

			dahulu dari pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi transaksi kas kecil.	
2.	Taufiqqurrahman (2014), <i>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Dasar Karya Utama Magelang</i> ³⁸	Sistem Pengendalian Intern dan Pengeluaran Kas	1. Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada PT. Dasar Karya Utama belum berjalan dengan semestinya, ditandai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. PT. Dasar Karya Utama mempunyai struktur organisasi yang sederhana namun belum terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam setiap bagian. b. PT. Dasar Karya Utama telah mengatur pembagian wewenang dalam pemberian otorisasi atas transaksi perusahaan dengan baik. Pada beberapa transaksi ada yang tidak melaksanakan otorisasi oleh kepala cabang 	1. Tempat penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Taufiqqurrahman adalah PT (Perseroan Terbatas), sementara penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Koperasi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Jika PT tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, sementara tujuan utama koperasi adalah untuk menyejahterakan para anggotanya. 3. Karyawan pada PT. Dasar Karya Utama belum sesuai dengan mutu dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sementara di KPRI INSKO para pengurus

³⁸Taufiqqurrahman, “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Dasar Karya Utama Magelang*”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, (2014), h.77-79

			<p>dikarenakan perusahaan tersebut menganut prinsip saling percaya satu sama lain, karena bagian-bagian penting yang ada di perusahaan tersebut di lakukan oleh orang-orang yang sudah dipercaya sejak lama oleh Kepala Perusahaan. Namun demikian, perusahaan tetap mengantisipasi adanya kecurangan dengan cara melakukan inspeksi dadakan untuk mengecek keakuratan setiap transaksi yang terjadi.</p> <p>c. Praktik yang sehat dalam Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas yang belum dilaksanakan dengan baik. Dokumen pengeluaran kas kecil yang</p>	<p>diambil dari anggotanya sendiri, sehingga nilai integritas seharusnya tetap terjaga.</p> <p>4. Antara PT. Dasar Karya Utama dan KPRI INSKO memiliki sistem pencatatan pengeluaran kas yang berbeda.</p>
--	--	--	---	--

			<p>digunakan belum menyediakan ruang untuk memberikan tanda pengecekan ulang oleh tim yang dibentuk untuk memeriksa keandalan dokumen.</p> <p>d. Karyawan PT. Dasar Karya Utama belum sesuai dengan mutu dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat dilihat dari bukti pengeluaran kas yang belum mencantumkan nama terang dan gelar karyawan. Seleksi calon karyawan sudah dilakukan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya dan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas yang diterapkan oleh PT. Dasar Karya Utama belum efektif.</p> <p>3. Sistem pengamanan dan perlindungan kas pada PT. Dasar Karya Utama belum berjalan dengan efektif.</p>	
3.	Fransisca Romana Wuri Wijayati (2008), <i>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas</i> ³⁹	Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	<p>1. Sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di KPRI "RAHAYU" Sapuran unit simpan pinjam sudah berjalan baik dan dapat melindungi kas koperasi, tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan.</p> <p>2. Sistem pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas KPRI "RAHAYU" Sapuran unit simpan pinjam</p>	<p>1. Objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca di KPRI "RAHAYU" Sapuran, memiliki objek penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini hanya memiliki 1 objek, yakni pengeluaran kas.</p> <p>2. Sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi penerimaan dan</p>

³⁹Fransisca Romana Wuri Wijayati, "*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas*", Skripsi Universitas Sanata Dharma, (2008), h.86-87

			<p>sudah efektif. Unsur-unsur sistem pengendalian intern telah diterapkan dengan baik dan dapat mencapai tujuan sistem pengendalian intern, walaupun masih ada beberapa kelemahan di dalamnya.</p>	<p>pengeluaran kas yang ada di KPRI “RAHAYU” Sapuran unit simpan pinjam sudah berjalan baik dan dapat melindungi kas koperasi, sementara di KPRI INSKO belum.</p>
4.	<p>Vicky Fiara Rizky Saragih (2018), Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan⁴⁰</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas</p>	<p>Secara keseluruhan, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan sudah memiliki sistem pengendalian intern yang bagus. Mereka telah banyak menerapkan sistem pengendalian yang sesuai dengan teori-teori yang dibuat para ahli. Hanya saja memang dalam beberapa hal masih perlu dilakukan perbaikan dan pemaksimalan lagi. Dikarenakan masih ditemuinya beberapa poin yang kurang sesuai dengan teori yang ada, seperti masih adanya perangkapan tugas yang terjadi antara Bagian Kasir dengan Bagian Akuntansi, belum diterapkannya pemeriksaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Vicky adalah PT (Perseroan Terbatas), sementara penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Koperasi. 2. Jika PT tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, sementara tujuan utama koperasi adalah untuk menyejahterakan para anggotanya. 3. PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur

⁴⁰Vicky Fiara Rizky Saragih, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2018), h.79

			<p>mendadak terhadap pekerjaan karyawan dan juga belum adanya bagian khusus yang dibentuk untuk melakukan pengendalian pada perusahaan. Terlepas dari beberapa hal tersebut, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan sudah memiliki sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang baik.</p>	<p>Cabang Medan sudah memiliki sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang baik, sedangkan KPRI INSKO masih belum.</p>
5.	<p>Rico Adetya Purnama (2015), <i>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. ENDC</i>⁴¹</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV ENDC mempunyai struktur organisasi yang sederhana namun belum terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam setiap bagian. 2. CV. ENDC telah mengatur pembagian wewenang dalam pemberian otorisasi atas transaksi perusahaan dengan baik. Pada beberapa transaksi ada yang tidak melaksanakan otorisasi oleh Manager dikarenakan perusahaan tersebut menganut prinsip saling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Serli adalah CV (badan usaha), sementara penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Koperasi. 2. Jika CV tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, sementara tujuan utama koperasi adalah untuk menyejahterakan para anggotanya. 3. Jika pada CV ENDC

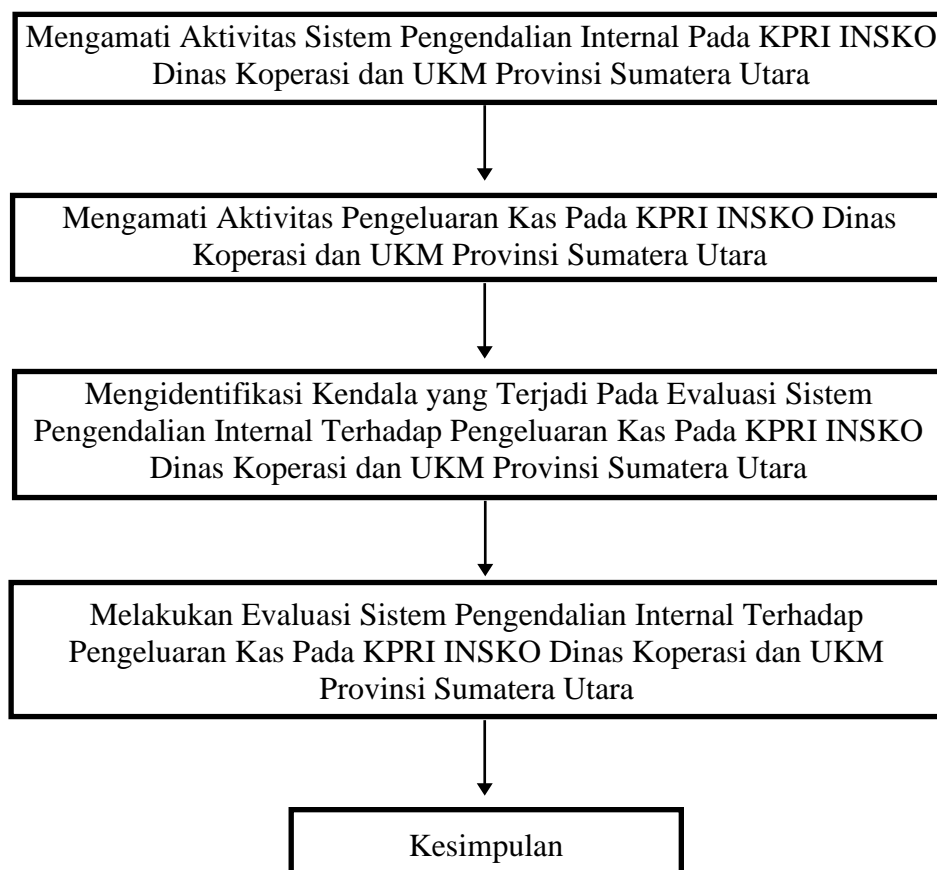
⁴¹Rico Adetya Purnama, "*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. ENDC*", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, (2015), h.67-68

			<p>percaya satu sama lain, karena bagian-bagian penting yang ada di perusahaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipercaya sejak lama oleh kepala perusahaan. Namun demikian, perusahaan tetap mengantisipasi adanya kecurangan dengan cara melakukan inspeksi dadakan untuk mengecek keakuratan setiap transaksi yang terjadi.</p> <p>3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi telah diterapkan oleh CV ENDC. Akan tetapi perusahaan belum menggunakan formulir bernomor urut tercetak. Selain itu karena terbatasnya karyawan, perusahaan tidak melakukan perputaran jabatan.</p> <p>4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya telah dilaksanakan oleh CV ENDC, karena</p>	<p>melakukan inspeksi dadakan untuk mengecek keakuratan setiap transaksi yang terjadi, maka pada KPRI INSKO masih belum melakukan inspeksi dadakan.</p>
--	--	--	---	---

			perusahaan telah melakukan seleksi terhadap calon karyawan. Dalam perekrutan karyawan perusahaan mengutamakan pengalaman dalam bidangnya untuk menjaga mutu pekerjaannya dapat diandalkan.	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Teoritis

Pembahasan pada penelitian ini digambarkan pada ilustrasi bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

Penjelasan atas gambar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, peneliti mengamati (mengobservasi) tentang aktivitas sistem pengendalian internal yang dijalankan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
2. Kedua, peneliti mengamati (mengobservasi) tentang aktivitas pengeluaran kas yang dijalankan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
3. Kemudian, peneliti mengidentifikasi kendala yang terjadi pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
4. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
5. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan atas hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.¹ Sedangkan, Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena mendeskripsikan data berupa laporan pengeluaran kas tahun buku 2020 pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, lalu melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, menjelaskan kendala-kendala yang terdapat pada evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, serta menjelaskan hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara secara kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto No. 218 Km 5,5 Medan 20123.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis pada rentang waktu bulan Mei – Oktober 2021.

¹Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.4

²Aan Prabowo, Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan* (Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-9), h.5

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1.	Penyusunan Proposal Skripsi							
2.	Seminar Proposal							
3.	Revisi Proposal							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Menganalisis Data							
6.	Revisi Skripsi							
7.	Sidang Munaqasyah							

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah subjek yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti.³

Subjek dalam penelitian ini adalah Manajer (Pelaksana Usaha), Pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara), dan Badan Pengawas di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

2. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁴

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO, yang mana adalah sistem pengendalian internal yang dilakukan terhadap laporan arus kas pada tahun buku 2020.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan secara

³Ismail Nuridin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h.108

⁴Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.45

deskriptif atau berbentuk uraian.⁵ Dalam hal ini yaitu uraian laporan pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan jenis data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pihak KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

b) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya koran, dokumen, dan bacaan lainnya.⁷ Dalam hal ini berupa dokumentasi laporan pengendalian intern dan pengeluaran kas tahun buku 2020 pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau kalau perlu pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuisisioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek

⁵*Ibid* h.47

⁶Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT.Grafindo Media Pratama, 2007), h. 79

⁷Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi:-Jilid 3*, (Jakarta: ESIS, 2006), h.110

penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkapkan penelitian yang dilakukan.⁸

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*Indepth Interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key information*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.⁹ Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan.

3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Pada pelaksanaannya, peneliti akan menggunakan data laporan pengendalian intern dan laporan pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara beserta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara memperoleh data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dibagi atas dua macam teknik, yakni teknik analisis data secara kuantitatif dan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kuantitatif menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengelola data. Teknik analisis data secara kualitatif menggunakan analisis kualitatif atau nonstatistik.¹¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

⁸M. Askari Zakariah, et. al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Development (R and D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h.43

⁹Sony Lamonisi, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon", *Jurnal EMBA* (Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal. 223-230), h. 226

¹⁰Jumania Septariani, "Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)* Vol. 2 No. 1, Desember 2018, 32-51, h.40

¹¹Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi: -Jilid 3*, h.111

ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode komparatif (perbandingan), yaitu berupa penjelasan atas data-data yang diperoleh kemudian membandingkan antara teori yang ada dengan penerapan yang terjadi di lapangan.

Tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan datum (data bentuk jamak, datum bentuk tunggal) yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis dan selanjutnya diinterpretasikan, baik dalam bentuk angka seperti 1,2,3 dan seterusnya maupun dalam bentuk kategori seperti baik, tinggi, dan sebagainya.¹²

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data

Setelah data dipindahkan maka selanjutnya adalah menampilkan data atau menyajikan data yang telah didapat dengan berupa draft wawancara ataupun hasil pengamatan sebelumnya.

4. Mengambil Kesimpulan

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung.¹³

¹²Ivan Fanani Qomusuddin, *Statistik Pendidikan*, (Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2019),h.6

¹³Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.81

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera berdiri pada tahun 1964 pada Instansi Inspektorat Koperasi yang sekarang bernama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Terbentuknya koperasi ini diprakarsai oleh Raja Tindil Manik yang merupakan Kepala Inspektorat Koperasi pada masa itu.

Latar belakang berdirinya koperasi ini adalah keinginan dari para pegawai negeri di lingkungan Inspektorat Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus sebagai pegawai di lingkungan Inspektorat Koperasi. Pada tahun 2007 badan hukum KPRI INSKO diubah, dari nomor 10/PAD/KWK.2/IV/95 yang disahkan pada tahun 1995, diubah menjadi nomor: 518/33/BH/PAD/II.14/VIII/KUKM/2007, dengan Klasifikasi A.

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mengalami perpindahan lokasi pada awal tahun 2020. Sebelumnya lokasi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berupa sebuah ruko yang berlokasi di Jl. Nusa Indah Raya, Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20124. Namun dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, ruko KPRI INSKO yang di daerah Helvetia harus dijual dan memutuskan untuk berpindah lokasi di satu kawasan yang sama bersama dengan lokasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai badan usaha memiliki dua unit usaha perdagangan dan jasa. Bidang usaha tersebut melayani anggota maupun non anggota, antara lain sebagai berikut:

- a. Unit simpan pinjam
- b. Unit toko

Awal terbentuknya KPRI INSKO ini diprakarsai oleh Raja Tindil Manik yang merupakan Kepala Inspektorat Koperasi pada masa itu. Anggotanya adalah pegawai-pegawai dari inspektorat koperasi tersebut. Dari tahun ke tahun KPRI INSKO terus mengalami perubahan. Seperti pernah menerima bantuan dari pemerintah yang diatur oleh dinas terkait yang ada di kabupaten/kota. Pernah berpindah lokasi gedung.

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah koperasi yang terletak lantai 2 gedung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto No. 218 Km 5,5 Medan, Sumatera Utara 20123

Pengurus inti KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara saat ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ada juga badan pengawas yang berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan pelaksanaannya dikomandoi oleh seorang manajer yang membawahi dua unit usaha pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yaitu unit simpan pinjam dan unit toko. Jumlah anggota KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah 101 orang (yang merupakan pegawai-pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara).

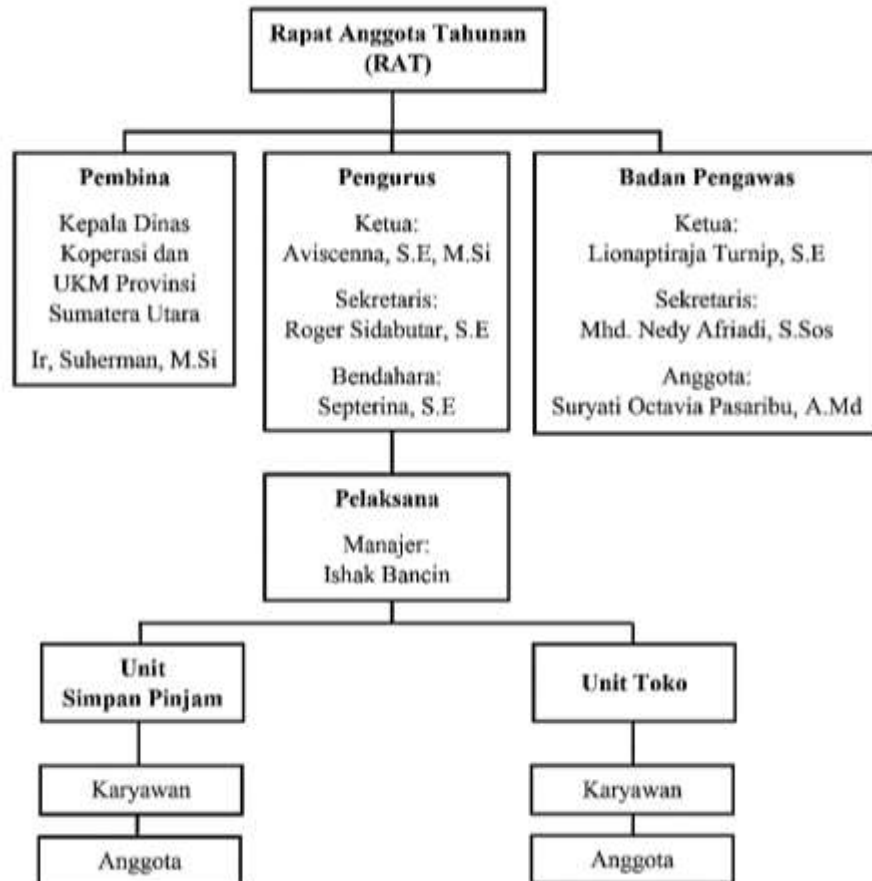
KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memiliki Visi “Terwujudnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional, Kreatif, Inovatif, dan Pelayanan prima bagi anggota”.

Misi dari KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah mengembangkan unit-unit usaha, meningkatkan kualitas dan kemampuan manajemen serta profesionalisme, mengoptimalkan dan memberdayakan aset, dan meningkatkan peran dan fungsi koperasi.

Tujuan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menyejahterakan para anggota yang tergabung di dalamnya, meningkatkan hasil usaha, meningkatkan dan mengembangkan jaringan usaha kemitraan yang lebih luas.

2. Struktur Organisasi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

(Sumber: KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Buku 2020).

Berikut akan disajikan uraian tugas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1) Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, dimana setiap anggota mempunyai hak

untuk menghadirinya. Rapat anggota yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Pengambilan suara dilakukan secara tertulis apabila hal ini dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang berhak suara di dalam rapat. Jikalau tidak, maka diambil dengan cara mengangkat tujuan dan anggota yang tidak hadir dapat mewakili suaranya kepada orang lain.¹

2) Pembina

Pembina adalah orang yang senantiasa memantau aktivitas koperasi. Pembina tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa atau anjuran pada pengurus koperasi, baik diminta maupun tidak.

3) Ketua

Ketua bertugas memimpin Rapat-rapat Anggota dan Rapat Pengurus, menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan, menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh seorang ketua, atau yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi.²

4) Sekretaris

Sekretaris bertugas untuk membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari Rapat-rapat Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada para anggota sebelum rapat diadakan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, sekretaris harus sesuai dengan keputusan pengurus dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.³

¹Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.

²Aviscenna, Ketua di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.

³Roger Felix Sidabutar, Sekretaris di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.

5) Bendahara

Tugas bendahara adalah mengurus pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan, mengusahakan tambahan modal untuk koperasi, mengurus administrasi keuangan, membuat dan mengkoordinasikan potongan gaji, bertindak sebagai kasir, memberikan kredit pinjaman.⁴

6) Badan Pengawas

Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan dan pemeriksaan atas dirinya sendiri. Pengawasan dan pemeriksaan itu dilakukan oleh suatu badan pengawas yang terdiri atas tiga orang anggota koperasi yang berasal dari anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurusan dan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Adapun fungsi dan tugas Badan Pengawas antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan langsung secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
- b) Melakukan pemantauan pada setiap kegiatan pelayanan sesuai dengan aturan dan jadwal yang telah direncanakan.
- c) Mengkoordinasikan setiap jadwal pengawasan kepada ketua dewan pimpinan.
- d) Menginventarisasi temuan-temuan atas pengawasa dan menjabarkannya sebagai dasar pemberian saran kepada dewan pimpinan.⁵

7) Manajer

Koperasi dalam memperlancar kegiatan operasional dalam suatu organisasi perlu satu orang manajer untuk mewujudkan suatu tujuan yang ditetapkan organisasi. Pada dasarnya peranan manajer adalah mengarahkan koperasi ke arah pencapaian tujuan dan

⁴Septerina, Bendahara di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.

⁵Lionaptiraja Turnip, Ketua Badan Pengawas di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.

sasarannya. Pada umumnya organisasi didirikan berdasarkan tujuan, dan para manajer bertugas untuk menggunakan serta menggabungkan semua sumber-sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan. Manajemen menjalankan koperasi ke arah pencapaian tujuan dengan menegaskan berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh para anggota koperasi.⁶

8) Karyawan

Karyawan adalah orang yang diangkat atau dipilih oleh Pengurus Koperasi untuk sebagai tenaga kerja tambahan pada koperasi.

9) Anggota

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana dalam Anggaran Dasar.

3. Jaringan Usaha KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Bergerak di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang melakukan penjualan barang dan penjualan jasa, penjualan jasa yang dilakukan oleh koperasi ini adalah unit simpan pinjam, dan juga bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota yang tergabung di dalamnya.

Adapun jaringan usaha yang terdapat pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Menyelenggarakan Unit Usaha Fotocopy dan ATK.
- c. Mengadakan Pinjaman ke BNI untuk di salurkan ke anggota.
- d. Menyelenggarakan Unit Simpan Pinjam bagi anggota.
- e. Mengadakan Penagihan Piutang Macet secara Intensif.

⁶Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.

- f. Menggabungkan Unit Usaha Simpan Pinjam seperti Pembinaan Usaha Kecil (PUK), Kredit CandaK Kulak (KCK) kepada Unit Usaha Simpan Pinjam Biasa.

4. Daftar Stok Barang KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Buku 2020

Adapun bentuk daftar stok barang KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara per 13 September 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Bentuk Daftar Stok Barang KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	Buku Tulis 50 lbr	8	Bh	1.500	12.000
2	Hekter HD 10	17	Bh	13.500	229.500
3	Pulpen FASTER	18	Bh	1.500	27.000
4	Klip Kertas	22	Ktk	1.500	33.000
5	Pulpen Line-T 20	23	Bh	5.000	115.000
6	Pisau Cutter	1	Bh	1.250	1.250
7	Pulpen AE7 Standard	15	Bh	1.250	18.750
8	Pulpen Nobel 1.0	11	Bh	5.500	60.500
9	Penghapus Stegler	50	Bh	2.200	110.000
10	Klip Binder No 200	0	Ktk	11.000	-
11	Klip Binder 155	0	Ktk	10.000	-
12	Pensil 2B	13	Bh	2.000	26.000
13	Pulpen Gramata H-3	24	Bh	1.500	36.000
14	Typ Ex Kenko	10	Bh	4.000	40.000
15	Stabilo	9	Bh	2.000	18.000
16	Paku Payung	20	Ktk	500	10.000
17	Stabilo	58	Bh	4.500	261.000
18	Handiplast	7	Bh	1.000	7.000
19	Pulpen Warna Warni	9	Bh	700	6.300
20	Amplop Dinas	100	Bh	750	75.000
21	Amplop AA Panjang	5	Ktk	18.000	90.000
22	Amplop AA Pendek	100	Bh	200	20.000
23	Gunting Kecil	6	Bh	3.000	18.000
24	Lem Setan	8	Bh	8.000	64.000
25	Pensil Biasa	36	Bh	750	27.000
26	Kaset CD	20	Bh	4.000	80.000
27	Bon Faktur Biasa	17	Bh	1.500	25.500
28	Bon Faktur NCR	16	Bh	2.250	36.000

29	Faktur Besar	12	Bh	5.500	66.000
30	Block Note	16	Bh	2.500	40.000
31	Amplop Besar	121	Bh	750	90.750
32	Lakban Besar	1	Bh	8.500	8.500
33	Slasiban Kecil Bening	0	Bh	750	-
34	Daftar Riwayat Hidup	50	Bh	750	37.500
35	Karbon	3	Ktk	25.000	75.000
36	Buku Expedisi	3	Bh	12.500	37.500
37	Note Book Batik	4	Bh	6.500	26.000
38	Map Tulang	15	Bh	750	11.250
39	Map Biola	34	Bh	1.800	61.200
40	Penahan Arsip	7	Bh	7.500	52.500
41	Lakban Bening	6	Bh	8.500	51.000
42	Kertas Fax	5	Bh	21.000	105.000
43	Kertas Jeruk Sampul	280	Lbr	210	58.800
44	Plastik Sampul	50	Lbr	450	22.500
45	HVS Warna	4	Rim	60.000	240.000
46	Data Print	4	Bh	25.000	100.000
47	Max Data	7	Bh	3.000	21.000
48	Kertas Kado	10	Lbr	500	5.000
49	HVS	3	Rim	52.000	156.000
50	Buku Kelengkapan Organisasi Kop	30	Bh	20.000	600.000
	Jumlah				3.312.300

(Sumber: KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Buku 2020).

B. Temuan Penelitian

1. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

- 1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.

Tanggung jawab fungsional merupakan hal penting dalam keberlangsungan koperasi. Struktur organisasi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pemisahan tanggung jawab fungsional. Hal ini terlihat dengan belum adanya pemisahan tanggung jawab antara bagian-bagian yang terkait dalam Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara . Bagian-bagian yang terkait ini antara lain adalah seluruh bagian yang berhubungan dengan pengeluaran kas. KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pemisahan antar fungsi penyimpanan kas dengan fungsi akuntansi. Transaksi Pengeluaran kas untuk kepentingan seluruh bagian pada perusahaan tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bendahara sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara transaksi pada pengeluaran kas ada beberapa transaksi dilaksanakan sendiri oleh bendahara contohnya mengurus pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan, mengusahakan tambahan modal untuk koperasi, mengurus administrasi keuangan, membuat dan mengkoordinasikan potongan gaji, bertindak sebagai kasir, dan memberikan kredit pinjaman.

2) Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya.

Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan (*updated*). Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan unsur tersebut pada perlindungan kekayaan saja yang dilakukan oleh bendahara. Bendahara akan mengeluarkan sejumlah uang apabila ada pengeluaran kas. Namun ada beberapa transaksi yang terjadi hanya dikendalikan oleh 1 (satu) pejabat saja yaitu bendahara karena KPRI INSKO ini menganut prinsip kekeluargaan dan saling percaya.. Hal ini menunjukkan tingkat keakuratan yang

kurang tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

3) Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi.

- a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pengeluaran kas kecil belum menggunakan nomor urut tercetak dalam formulirnya tetapi menggunakan nomor urut transaksi.

- b) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa.

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan pemeriksaan mendadak dikarenakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara hanya melakukan hasil pemeriksaan pada saat RAT.

- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa adanya campur tangan oleh orang atau organisasi lain.

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara setiap transaksi memang tidak dilaksanakan oleh satu orang, hanya saja pada transaksi pengeluaran kas dilaksanakan oleh seorang bendahara yang merangkap beberapa fungsi.

- d) Perputaran jabatan untuk menghindari terjadinya persekongkolan.

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan perputaran jabatan, ditandai dengan setiap 3 tahun sekali akan dilakukan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan yang ada berdasarkan hasil kesepakatan RAT.

- e) Secara periodik dilakukan pencocokan kas yang ada di tangan dengan catatannya.

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pencocokan kas yang di tangan dengan catatannya tidak dilakukan secara periodic tetapi hanya dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- f) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal lain, unit organisasi ini disebut badan pengawas atau satuan pengawas internal atau staf pemeriksa internal.

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki badan pengawas tersendiri yang bertugas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan unsur-unsur sistem pengendalian internal.

- 4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Pada KPRI INSKO karyawan-karyawan yang ada sudah sesuai mutu dengan tanggung jawabnya.

b. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

1) Fungsi Pembelian

Yaitu fungsi yang dipegang oleh bendahara yang bertugas melakukan pembelian. Kemudian melakukan pencatatan pembelian.

2) Fungsi Penjualan

Yaitu fungsi yang dipegang oleh bendahara yang bertugas melakukan penjualan. Kemudian melakukan pencatatan penjualan.

3) Fungsi Kas

Yaitu fungsi yang dipegang oleh bendahara yang bertugas menerima surat, melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, dan membuat laporan pengeluaran kas.

c. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

1) Prosedur pembuatan bukti kas keluar

Dalam prosedur ini bendahara yang membuat bukti kas keluar untuk pembayaran atas transaksi pengeluaran kas.

2) Prosedur Pembayaran Kas

Dalam prosedur ini bendahara yang membuat pembayaran kas atas suatu transaksi pengeluaran kas.

3) Prosedur pencatatan pengeluaran kas

Dalam prosedur ini pencatatan pengeluaran kas dilakukan oleh bendahara di buku catatan pengeluaran kas dan mencatat persediaan stok barang yang ada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

d. Dokumen yang Digunakan KPRI INSKO Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

1) Bukti Kas Keluar

Bukti kas keluar ini dibuat oleh bendahara berdasarkan kas yang keluar.

2) Cek

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah menggunakan cek dalam melakukan pembayaran atas pengeluaran kas. Terutama jika bernominal besar.

3) Permintaan Cek

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan permintaan cek dalam melakukan pembayaran atas pengeluaran kas.

e. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menggunakan catatan akuntansi, yaitu:

1) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas tersebut berisi tentang pengeluaran kas KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun buku 2020.

2) Laporan Pemberian Pinjaman Tiap Bulan

Laporan pemberian pinjaman tiap bulan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun buku 2020 tersebut akan berguna untuk laporan hasil pengawasan badan pengawas yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Pada laporan pemberian pinjaman tiap bulan tersebut tertera jumlah nominal pada setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

3) Laporan Hasil Pengawasan Unit Simpan Pinjam Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Buku 2020 adalah hasil dari tugas badan pengawas pada unit simpan pinjam. Pada laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam tersebut tertera 3 (tiga) uraian, yaitu pemberian pinjaman, pendapatan, dan

beban operasional. Di bagian akhir juga tertera jumlah sisa hasil usaha (SHU) dari mulai tahun 2018, 2019, 2020. Pada tahun 2018 total SHU berjumlah Rp85.770.188, pada tahun 2019 total SHU berjumlah Rp135.706.307, dan pada tahun 2020 total SHU berjumlah Rp73.003.766.

4) Laporan Hasil Pengawasan Unit Toko Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Laporan hasil pengawasan unit toko pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Buku 2020 berisi laporan dan penjelasan tentang operasional Unit Toko KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan membahas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dilakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan cara membandingkan teori sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dengan pelaksanaan yang terjadi pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

a. Perbandingan Unsur-unsur teori Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum memisahkan beberapa fungsi.

Tabel 4.2
Perbandingan Teori Tentang Struktur Organisasi yang Memisahkan
Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas Dengan Pelaksanaannya
Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Fungsi Penjualan Terpisah dari Fungsi Kas	Tidak	KPRI INSKO belum memisahkan kedua fungsi ini. Dikarenakan KPRI INSKO belum mempunyai karyawan khusus di bagian penjualan, pembelian, dan kas.
2. Fungsi Kas Terpisah Dengan Fungsi Akuntansi	Ya	Kedua fungsi tersebut terpisah namun semua pencatatan akuntansi dan transaksi masih dipegang oleh seorang bendahara saja.
3. Fungsi Gedung Terpisah Dari Fungsi Pengiriman	Tidak	Fungsi ini tidak diterapkan pada KPRI INSKO.
4. Transaksi Penjualan dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi	Tidak	Transaksi penjualan di KPRI INSKO belum dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi, ini dilihat dengan adanya penggabungan fungsi penjualan dan fungsi kas.

2) Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya

Adapun sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya belum berjalan dengan baik adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Perbandingan Teori Tentang Sistem Wewenang Dan Prosedur
Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup
Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya Dengan
Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Pengeluaran kas diotorisasi oleh fungsi kas	Ya	Fungsi pengeluaran kas sudah dijalankan pada KPRI INSKO dengan membubuhkan tanda resmi berupa stemple saat kas sudah dikeluarkan.
2. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman	Tidak	Tidak dijalankan pada KPRI INSKO
3. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi	Tidak	Tidak dijalankan pada KPRI INSKO

3) **Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi**

Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit di koperasi belum berjalan dengan baik dilakukan oleh KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.4
Perbandingan Teori Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan
Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Dengan Pelaksanaannya
Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Faktur bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan	Tidak	Faktur yang digunakan di KPRI INSKO belum bernomor urut cetak, jadi belum menunjukkan pengendalian internal yang cukup baik

2. Jumlah yang diterima dari penjualan unit toko disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan atau hari kerja berikutnya	Ya	Kas yang diterima setiap harinya langsung disetor ke bank pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya oleh bendahara
3. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan internal	Tidak	Karena pemeriksaan internal dilakukan pada saat RAT

4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya

Karyawan-karyawan yang ada pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya yang dibutuhkan oleh KPRI INSKO.

Tabel 4.5

**Perbandingan Teori Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan
Tanggung Jawabnya Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

Teori	Praktik	Keterangan
1. Penerimaan karyawan melalui tes seleksi	Ya	Penerimaan karyawan pada KPRI INSKO sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan
2. Adanya pelatihan bagi karyawan baru	Tidak	Karyawan-karyawan yang diterima langsung bekerja dengan sistem <i>learning by doing</i>
3. Adanya pelatihan bagi karyawan selama bekerja di perusahaan	Ya	Ada pelatihan bagi karyawan lama selama bekerja di KPRI INSKO

b. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO ada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas. Fungsi-fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori.

Tabel 4.6

Perbandingan Teori Tentang Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas	Ya	Pada KPRI INSKO fungsi ini dilaksanakan oleh bendahara
2. Fungsi Kas	Ya	Fungsi Kas pada KPRI INSKO dilaksanakan oleh bendahara
3. Fungsi Akuntansi	Ya	Fungsi Akuntansi pada KPRI INSKO dilaksanakan oleh bendahara.
4. Fungsi Pemeriksaan Internal	Ya	Fungsi Pemeriksaan Internal pada KPRI INSKO dilaksanakan oleh Badan Pengawas

c. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Dalam menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, KPRI INSKO telah melaksanakan sebagian prosedur.

Tabel 4.7

Perbandingan Teori Tentang Prosedur yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Prosedur pembuatan bukti kas keluar	Ya	Pada KPRI INSKO prosedur ini

		dilaksanakan oleh bendahara
2. Prosedur pembayaran kas	Ya	Pada KPRI INSKO prosedur ini dilaksanakan oleh bendahara
3. Prosedur pencatatan pengeluaran kas	Ya	Pada KPRI INSKO prosedur ini dilaksanakan oleh bendahara yang dicatat dalam laporan arus kas

d. Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Dalam menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, KPRI INSKO menggunakan dokumen-dokumen yang terdiri dari bukti kas keluar dan cek.

Tabel 4.8

Perbandingan Teori Tentang Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Teori	Praktik	Keterangan
1. Bukti kas keluar	Ya	Pada KPRI INSKO bukti kas keluar dibuat rangkap dua
2. Cek	Ya	Pada KPRI INSKO menggunakan cek dalam pengeluaran kasnya
3. Permintaan cek	Tidak	Dokumen permintaan cek tidak ada pada KPRI INSKO

e. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Dalam menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menggunakan catatan akuntansi.

Tabel 4.9

**Perbandingan Teori Tentang Catatan Akuntansi yang Digunakan
Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas
Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan
UKM Provinsi Sumatera Utara**

Teori	Praktik	Keterangan
1. Jurnal pengeluaran kas	Tidak	Pada KPRI INSKO tidak menggunakan jurnal pengeluaran kas, tetapi menggunakan laporan arus kas, laporan pemberian pinjaman tiap bulan, laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam, dan laporan hasil pengawasan unit toko.
2. Register cek	Tidak	Pada KPRI INSKO tidak menggunakan register cek dalam catatan akuntansinya

2. Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dibandingkan antara teori dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara di atas, maka dapat dijabarkan hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

- 1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas Belum Berjalan dengan Baik

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara masih belum melaksanakan pemisahan beberapa fungsi, seperti:

- a) Fungsi penjualan yang belum dipisahkan dengan fungsi kas, dikarenakan KPRI INSKO belum mempunyai karyawan khusus di bagian penjualan, pembelian, dan kas.
- b) Fungsi kas yang belum dipisahkan dengan fungsi akuntansi, dikarenakan semua pencatatan akuntansi dan transaksi masih dipegang oleh seorang bendahara saja.
- c) KPRI INSKO tidak menerapkan fungsi Gedung terpisah dari fungsi pengiriman.
- d) KPRI INSKO tidak melakukan transaksi penjualan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi

Jadi pada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas masih belum dilaksanakan secara efektif dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan masih terdapat rangkap fungsi yang dijalankan oleh bendahara yang mengelola beberapa fungsi sekaligus.

- 2) Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan Dan Biaya Belum Berjalan dengan Baik

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya masih belum berjalan dengan baik, seperti:

- a) Pengeluaran kas sudah diotorisasi oleh fungsi kas pada KPRI INSKO karena fungsi pengeluaran kas sudah membubuhkan tanda resmi berupa stemple saat kas sudah dikeluarkan.

- b) Penyerahan barang tidak diotorisasi fungsi pengiriman karena pada KPRI INSKO tidak terdapat fungsi pengiriman karena KPRI INSKO tidak menerapkan sistem order.
- c) Pencatatan ke dalam buku jurnal tidak diotorisasi oleh fungsi akuntansi karena fungsi pencatatan akuntansi pada KPRI INSKO sudah dijalankan oleh bendahara.

Jadi sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya masih belum berjalan dengan baik pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan hanya pada pengeluaran kas yang sudah diotorisasi oleh fungsi kas.

3) Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Belum Berjalan Dengan Baik

Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi masih belum berjalan dengan baik, seperti:

- a) Belum menggunakan faktur bernomor urut tercetak dan belum dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan karena pada KPRI INSKO tidak menggunakan faktur.
- b) Jumlah yang diterima dari penjualan unit toko langsung disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama oleh bendahara pada KPRI INSKO.
- c) Tidak adanya pemeriksaan internal terhadap fungsi kas secara mendadak oleh fungsi pengendalian internal.

Jadi praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi masih belum berjalan dengan baik pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan tidak adanya pemeriksaan internal terhadap fungsi kas secara mendadak, sehingga peluang untuk terjadinya penyelewengan kas sangat terbuka lebar.

4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya Sudah Berjalan dengan Baik

Karyawan-karyawan yang ada pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki mutu yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

- a) Penerimaan karyawan yang melalui tes seleksi sudah dijalankan pada KPRI INSKO karena KPRI INSKO ingin mendapatkan kualitas terbaik dari para karyawan yang akan diterima.
- b) Tidak adanya pelatihan bagi karyawan baru pada KPRI INSKO karena KPRI INSKO menerapkan sistem *learning by doing*.
- c) Adanya pelatihan bagi karyawan selama bekerja di KPRI INSKO karena untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) para karyawan.

Jadi karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan karyawan-karyawan yang terdapat pada KPRI INSKO sudah melalui tes seleksi dan diberikan pelatihan-pelatihan selama bekerja di KPRI INSKO.

b. Fungsi yang Terkait Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO ada fungsi-fungsi terkait yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan internal.

c. Prosedur yang Dilaksanakan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO terdapat prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas.

d. Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Dengan Pelaksanaannya Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Pada KPRI INSKO terdapat dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti bukti kas keluar dan cek. Sementara pada dokumen permintaan cek tidak terdapat pada KPRI INSKO karena dokumen permintaan tersebut tidak ada.

e. Catatan Akuntansi yang Digunakan KPRI INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

Pada KPRI INSKO tidak terdapat catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti jurnal pengeluaran kas dan register cek yang tidak digunakan pada KPRI INSKO. Tetapi KPRI INSKO hanya menggunakan laporan arus kas, laporan pemberian pinjaman tiap bulan, laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam, dan laporan hasil pengawasan unit toko.

3. Kendala yang Terdapat Dalam Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tentunya penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi, seperti sebagai berikut:

- a. Kurang tepatnya pembagian struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas, karena beberapa fungsi yang masih dijalankan oleh seorang bendahara.
- b. Sistem pencatatan transaksi dan pencatatan laporan keuangan (khususnya laporan arus kas) masih menggunakan sistem manual.
- c. KPRI INSKO menganut sistem kekeluargaan sehingga rasa saling percaya antar sesama anggota sudah terjaga, padahal dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas kita juga harus mengetahui tentang arus kas atau kondisi keuangan KPRI.
- d. Kurang maksimalnya pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan, karena masih hanya berfokus pada perlindungan kekayaan, sementara untuk perlindungan utang, pendapatan, biaya belum dilakukan.
- e. Tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas, sehingga pengendalian internal terhadap pengeluaran kas tidak berjalan efektif.
- f. Badan pengawas yang menjalankan fungsi pengendalian internal masih diambil dari sesama anggota KPRI INSKO, bukan diambil dari pihak luar yang independen, sehingga peluang terjadinya intervensi pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas masih terbuka lebar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab IV, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan teori dan pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang belum sepenuhnya dijalankan oleh KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
2. Hasil evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa:
 - a. Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan teori unsur-unsur sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti:
 - 1) Pada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas masih belum secara efektif dikarenakan masih terdapat rangkap fungsi yang dijalankan oleh bendahara yang mengelola beberapa fungsi sekaligus.
 - 2) Pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya masih belum berjalan dengan baik dikarenakan hanya pada pengeluaran kas yang sudah diotorisasi oleh fungsi kas.
 - 3) Pada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya pemeriksaan internal terhadap fungsi kas secara mendadak, sehingga peluang untuk terjadinya penyelewengan kas sangat terbuka lebar.

- 4) Pada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik dikarenakan karyawan-karyawan sudah melalui tes seleksi dan diberikan pelatihan-pelatihan selama bekerja di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ada fungsi-fungsi terkait yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan internal.
 - c. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terdapat prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan teori dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas.
 - d. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terdapat dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti bukti kas keluar dan cek. Sementara pada dokumen permintaan cek tidak terdapat pada KPRI INSKO karena dokumen permintaan tersebut tidak ada.
 - e. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, seperti jurnal pengeluaran kas dan register cek yang tidak digunakan pada KPRI INSKO. Tetapi KPRI INSKO hanya menggunakan laporan arus kas, laporan pemberian pinjaman tiap bulan, laporan hasil pengawasan unit simpan pinjam, dan laporan hasil pengawasan unit toko.
3. Adapun kendala dalam evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah:
 - a. Kurang tepatnya pembagian struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas.

- b. Sistem pencatatan transaksi dan pencatatan laporan keuangan (khususnya laporan arus kas) masih menggunakan sistem manual, yang menimbulkan resiko kehilangan yang sangat besar terhadap bukti-bukti transaksi maupun bukti-bukti pencatatan.
- c. Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menganut sistem kekeluargaan sehingga rasa saling percaya antar sesama anggota sudah terjaga..
- d. Kurang maksimalnya pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan.
- e. Tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas.
- f. Badan pengawas yang menjalankan fungsi pengendalian internal masih diambil dari sesama anggota KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, bukan diambil dari pihak luar yang independent.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara harus melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, khususnya pada bagian badan pengawas yang seharusnya diambil dari pihak independen agar hasil pengendalian internalnya tidak mudah untuk diintervensi pihak manapun.
2. Aktivitas pengeluaran kas memerlukan bendahara tersendiri sehingga seorang bendahara tidak merangkap beberapa fungsi yang berbeda. Pada aktivitas pengeluaran kas juga seharusnya bisa menggunakan sistem komputerisasi atau digitalisasi terhadap pencatatan transaksi pengeluaran kas agar setiap transaksi pengeluaran kas yang terjadi bisa memiliki bukti transaksi yang permanen dalam bentuk *soft copy* yang otomatis akan tercatat pada sistem sehingga bukti transaksi tidak mudah hilang. Dan pada pencatatan laporan keuangan (laporan arus kas), juga bisa menggunakan aplikasi pencatatan digital seperti *Myob Accounting* agar pencatatan laporan keuangan berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara seharusnya bisa memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas, agar bisa berjalan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di masa mendatang.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dapat memahami evaluasi sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dengan baik, atau bahkan bisa lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Proses dan Penerapan*, Jakarta: Andi, 2015.
- Aviscenna, Ketua di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.
- Bahreisy, Salim, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, Bandung: PT Alma'arif, 1989.
- Baridwan, Zaki, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2002.
- *Sistem Akuntansi Edisi 5 Cetakan ke 3*, Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2001.
- Hafiduddin, Didin dan Hendra Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2009.
- Harahap, Rahmat Daim. 2020. “*Akuntansi Syariah*”, Diklat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Harmain, Hendra, dkk., *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 3*, Medan: Madenatera. 2018.
- Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hery, *Siklus Akuntansi Perusahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standard Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Imsar. 2018. *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*”, Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 17 Juni 2021.
- Jannah, Amani Raudhatul. 2018. “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan*”, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (ed. 3), AMP: YKPN, 2010.

- Lamonisi, Sony. 2016. “*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon*”, Jurnal EMBA (Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal. 223-230).
- Lionaptiraja Turnip, Ketua Badan Pengawas di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.
- Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Maryanti, Kun dan Juju Suryawati, *Sosiologi: -Jilid 3*, Jakarta: ESIS, 2006.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- *Sistem Akuntansi*, (ed.4), Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- *Auditing*, (ed. 6), Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nasution, Yenni Samri Juliati dan Amani Raudhatul Jannah. 2019. “*Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan*”, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, (Vol.2 No.1 Desember 2019, hal. 516).
- Nurdin, Ismail, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Prabowo, Aan, Heriyanto. 2013. “*Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang*”, Jurnal Ilmu Perpustakaan (Volume 2, Nomor 2).
- Pradnyawati, Gusti Ayu Anom, Wayan Suhendra, Nyoman Sudjana. 2019. “*Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Pegawai Negeri Setya Graha di Kecamatan Mendoyo Tahun 2017*” Jurnal Pendidikan Ekonomi (Vol. 11, Nomor 01 2019, 250-259).
- Purnama, Rico Adetya. 2015. “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. ENDC*”, Skripsi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qomusuddin, Ivan Fanani, *Statistik Pendidikan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Revee, James M., et. al., *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

- Roger Felix Sidabutar, Sekretaris di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.
- Saragih, Vicky Fiara Rizky. 2018. “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan*”, Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Saifi, Muhammad dan Nila Firdausi Nuzula. 2015. “*Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas*” *Jurnal Akuntansi Bisnis* (Vol.2 No.2 Februari).
- Septariani, Jumania. 2018. “*Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)* Vol. 2 No. 1, Desember 2018, 32-51.
- Septerina, Bendahara di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 04 Oktober 2021.
- Septriani, Serli. 2018. “*Evaluasi Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada CV. Pemuda Jaya Karsa Kota Bengkulu*”, Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- *Sistem Akuntansi Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Suroso. 2016. “*Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galuh Pratama*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu* (Vol.2 No.1 Maret).
- Taufiqurrahman. 2014. “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Dasar Karya Utama Magelang*”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Pengendalian Internal Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*, Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Usman, Husain, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT.Grafindo Media Pratama, 2007.
- Warren, dkk., *Pengantar Akuntansi Edisi 21*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Weygandt, Jerry J., et. al., *Accounting Principles*, (ed. 7), Terj. Ali Akbar Yulinto, Wasilah, dan Ranga Handika, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Wijayati, Fransisca Romana Wuri. 2008. “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas*”, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Zakariah, M. Askari, et. al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Development (R and D)*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

<http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-struktur-pengendalian-intern>

<https://quran.kemenag.co.id/sura/58/7>

<https://quran.kemenag.co.id/sura/90/17>

<https://quran.kemenag.co.id/sura/103/3>

LAMPIRAN

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)		
LAPORAN ARUS KAS		
PERIODE 31 DESEMBER 2020		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Tahun Berjalan (SHU)	Rp 73,003,766.00	
Penurunan Piutang Usaha	Rp 126,993,642.00	
Kenaikan Utang Usaha-Non Anggota	Rp 1,016,000.00	
Kenaikan Dana Sosial SHU	Rp 6,658,300.00	
Kenaikan Dana Sosial KPRI	Rp 943,000.00	
Kenaikan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 213,548,500.00	
Penurunan Dana Ex. SHU dan Cadangan	-Rp 11,739,942.00	
Kenaikan Utang Lain-Lain	Rp 6,658,300.00	
Penyusutan Inventaris Unit Toko	-Rp 22,613,700.00	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		Rp 394,467,866.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Inventaris Simpan Pinjam	-Rp 6,000,000.00	
Penjualan Inventaris Unit Toko	Rp 119,065,200.00	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		Rp 113,065,200.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan Simpanan Pokok	Rp 600,000.00	
Penurunan Simpanan Wajib	-Rp 49,737,091.00	
Penurunan Simpanan Asset Ruko	-Rp 1,665,590.71	
Penurunan Simpanan Pemupukan Modal	-Rp 9,931,386.03	
Penurunan Simpanan Lain-Lain	-Rp 3,130,335.23	
Kenaikan Cadangan	Rp 29,291,590.00	
Pembagian SHU Tahun Lalu	-Rp 134,666,357.00	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-Rp 169,239,169.97
Kenaikan Kas		Rp 338,293,896.03
Kas dan Bank Awal Periode 2020		Rp 865,195,717.46
Kas dan Bank Akhir Periode 2020		Rp 1,203,489,613.49

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)		
LAPORAN PEMBERIAN PINJAMAN TIAP BULAN		
PERIODE 31 DESEMBER 2020		
No	Bulan	Pinjaman Tunai (Rp)
1	Januari	193.000.000
2	Pebruari	316.300.000
3	Maret	156.000.000
4	April	466.500.000
5	Mei	21.000.000
6	Juni	3.550.000
7	Juli	165.000.000
8	Agustus	130.000.000
9	September	18.000.000
10	Oktober	79.300.000
11	November	38.000.000
12	Desember	65.000.000
Total		1.651.650.000
Penjelasan:		
<p>Pada saat pemeriksaan masih ditemukan 9 (sembilan) orang anggota tidak rutin membayar simpanan, 15 (lima belas) orang tidak membayar simpanan dan utang, dan 3 orang non anggota yang tidak membayar utang.</p>		

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)
LAPORAN HASIL PENGAWASAN UNIT TOKO
PERIODE 31 DESEMBER 2020**

Penjelasan:

Pada tahun 2020 operasional Unit Toko KPRI INSKO sudah tidak dijalankan, biaya operasional maupun penyusutan aset tetap unit toko tidak dibebankan dari pendapatan operasional koperasi, namun unit ini meninggalkan catatan tunggakan utang sebesar Rp. 1.462.300,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----|---|
| 1. | Piutang macet atas nama Tiodor Sihotang dari penjualan ATK sebesar Rp. 1.086.600,- sejak tahun 2012. |
| 2. | Pada jasa fotocopy terdapat piutang macet atas nama Tiodor Sihotang sebesar Rp. 375.000,- sejak tahun 2012. |

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO) LAPORAN HASIL PENGAWASAN UNIT SIMPAN PINJAM PERIODE 31 DESEMBER 2020				
Unit Usaha	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Unit Simpan Pinjam	Pemberian Pinjaman	1.927.801.000	1.686.925.000	1.651.650.000
	Pendapatan	253.560.188	291.923.307	240.246.380
	Beban Operasional	167.790.000	156.217.000	141.489.200
	Sisa Hasil Usaha	85.770.188	135.706.307	73.003.766







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Laksamana Aru Sulaiman
2. NIM : 0502172353
3. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 03 September 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Jemadi Gg. Bunga No. 48 Medan

II. DATA ORANG TUA

- Nama Ayah : Yosep Eka Permana
Nama Ibu : Rika Vera Sopha, S.H, M.M

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Pertiwi Medan Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan SMP Pertiwi Medan Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan SMAN 3 Medan Berijazah Tahun 2017

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Young Qur'anic SMP Pertiwi Medan
Jabatan : Ka. Bidang Pengajian
2. Teater Muda SMAN 3 (TEMUGA)
Jabatan : Ka. Bidang Pementasan
3. E2AR (Economic English Arabic Rabbani) FEBI-UINSU
Jabatan : Ka. Bidang Infokom